

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, serta untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan internal. Pengawasan Internal melibatkan berbagai kegiatan seperti audit, peninjauan, penilaian, monitoring, dan kegiatan pengawasan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari pengawasan internal adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta untuk mendukung pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. (Peraturan Pemerintah RI, 2008).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur sistem pengendalian internal, yang meliputi:

1. Lingkungan pengendalian

Kepala Instansi Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan atmosfer pengendalian yang mendorong perilaku yang baik dan mendukung penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja. Hal ini dilakukan melalui upaya penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap peningkatan kompetensi, kepemimpinan yang mendukung, pembentukan struktur organisasi yang sesuai, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang sesuai, penerapan kebijakan yang memperhatikan pembinaan sumber daya manusia, efektivitas peran aparat pengawasan internal pemerintah, dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah lainnya.

2. Penilaian risiko

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan sistem yang memadai untuk mengidentifikasi risiko yang

berasal dari faktor internal maupun eksternal, serta mengevaluasi elemen lain yang dapat meningkatkan risiko tersebut.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah harus melaksanakan pengendalian sesuai dengan skala, kompleksitas, dan karakteristik dari tugas dan fungsi yang terkait dengan instansi tersebut. Beberapa kegiatan pengendalian mencakup evaluasi kinerja instansi, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan sistem informasi, pengelolaan aset secara fisik, serta penetapan dan evaluasi kebijakan. indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian dan masih banyak lagi.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah harus mengenali, mencatat, dan menyampaikan informasi dengan format dan jadwal yang sesuai. Komunikasi mengenai informasi tersebut, sesuai dengan Pasal 41, harus dilakukan dengan efektif. Agar komunikasi berjalan efektif, kepala instansi pemerintah perlu menghadirkan dan memanfaatkan beragam alat dan sarana komunikasi, serta secara terus-menerus mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi.

5. Pemantauan pengendalian internal

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan (diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas), evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan peninjauan ulang lainnya.

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terpadu di Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal adalah serangkaian tindakan dan kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh para pimpinan dan karyawan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, memastikan keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. SPIP, singkatan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan secara komprehensif baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

1. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

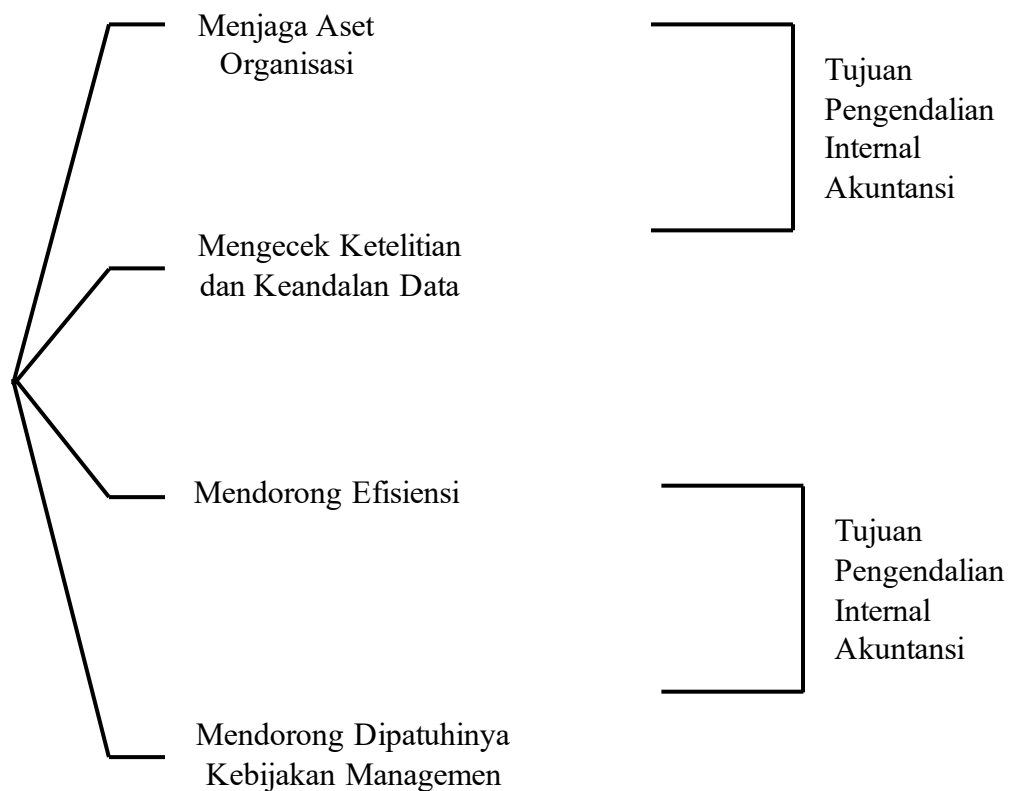
Menurut Mulyadi (2018:129), dikutip dalam jurnal ilmiah (Aprilianti *et al.*, 2020),

Sistem pengendalian internal memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Menjaga aset organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tujuan pengendalian internal adalah:

1. Untuk menghindari segala kemungkinan terjadinya kecurangan penyelewengan dan lain-lainya maka perlu adanya pengamanan terhadap kekayaan perusahaan. Untuk itu perlu suatu pengendalian yang memadai untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi Laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi keuangan dan laporan manajemen yang berisi informasi akuntansi manajemen harus dapat dipercaya, tidak menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya. Dalam melakukan uji coba, harus dipisahkan fungsi-fungsi yang ada dalam struktur organisasi terutama yang berhubungan langsung dengan transaksi keuangan.
3. Mendorong efisiensi Dengan adanya metode dan prosedur pengendalian biaya maka akan dapat mengatur pengeluaran dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Dengan adanya kebijaksanaan yang dijalankan, dan telah ditetapkan oleh pimpinan bahwa pengendalian adalah hal yang penting di dalam perusahaan. Sehingga semua karyawan harus mematuhi dan melaksanakannya.



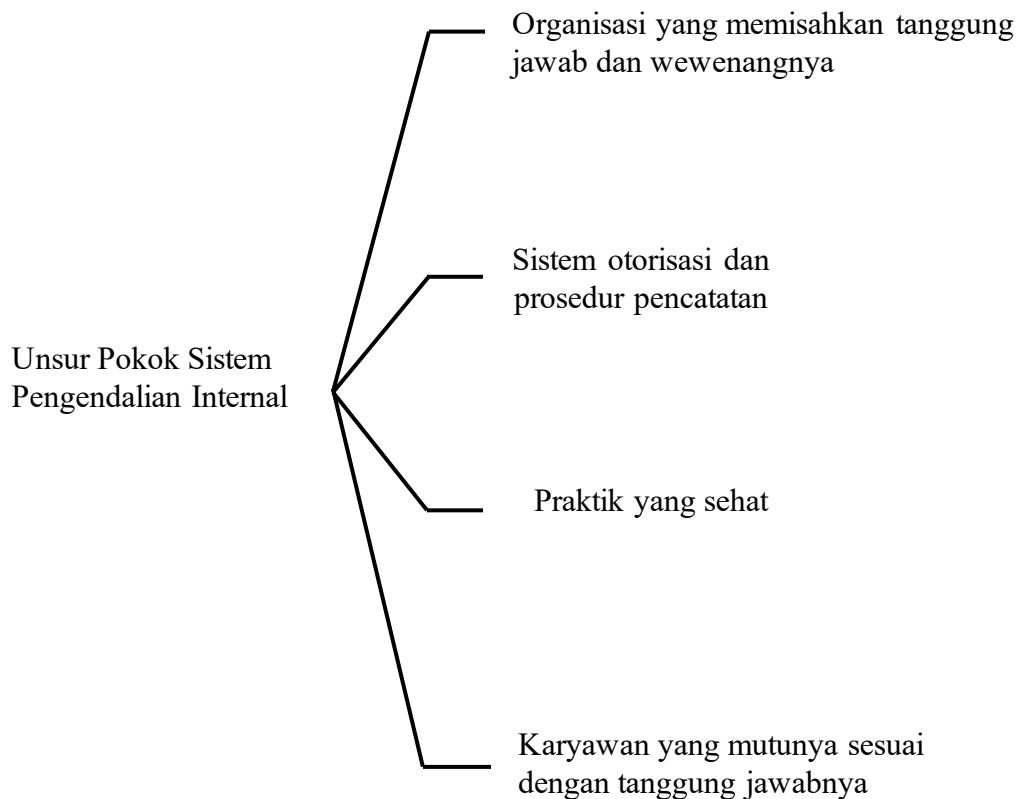
Gambar 2.1 Tujuan Pokok Sistem Pengendalian Internal

Sumber : Mulyadi (2018)

2. Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2018 : 130), dikutip dalam jurnal ilmiah (Yuniarti & Asliana, 2020) Unsur sistem pengendalian internal yaitu :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan dan beban.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.



Gambar 2.2 Unsur Pokok Sistem Pengendalian Internal

Sumber : Mulyadi (2018)

4. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Menurut Mulyadi (2018:136), dikutip dalam jurnal ilmiah (Hanso, 2018) lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan Tindakan para pemilik dan manager Perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal Perusahaan. Efektivitas unsur pengendalian internal ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian Dikutip dalam jurnal ilmiah Lingkungan pengendalian memiliki empat unsur :

1. Filosofi dan gaya operasi.
2. Berfungsinya sebagai dewan komisaris dan komitee audit.
3. Metode pengendalian manajemen.
4. Kesadaran Pengendalian.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO

Definisi pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) dalam Azhar Susanto adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk

memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Sumarlin, 2020, p. 47)

3. Komponen Pengendalian Internal COSO

Pada pengendalian internal, kerangka kerja yang paling luas diterima di Amerika Serikat membagi beberapa komponen yang dirancang dan mengimplikasikan oleh manajemen agar dapat memberi kepastian yang layak bahwa tujuan dari pengendalian dapat tercapai.

Adapun beberapa komponen dari pengendalian COSO tersebut dalam Sujarweni antara lain sebagai berikut (Sumarlin, 2020, p. 51) :

1. Lingkungan Pengendalian

Dapat dikatakan bahwa lingkungan pengendalian adalah suatu sarana serta prasarana dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki fungsi untuk mengimplementasikan struktur pengendalian internal dengan baik.

2. Penilaian risiko

Perlu dilakukan identifikasi terhadap segala risiko yang dapat timbul dalam perusahaan oleh pihak manajemen. Apabila risiko telah dipahami, maka dapat dilakukan tindak pencegahan atas risiko tersebut sehingga menguntungkan perusahaan karena dapat mencegah kerugian itu. Terdapat beberapa risiko yang dapat timbul dalam perusahaan, yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok antara lain sebagai berikut:

- a. **Risiko finansial**, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihabur- haburkan, atau dicuri.
- b. **Risiko strategis**, dimana terjadinya kesalahan cara saat mengerjakan sesuatu.
- c. **Risiko informasi**, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.

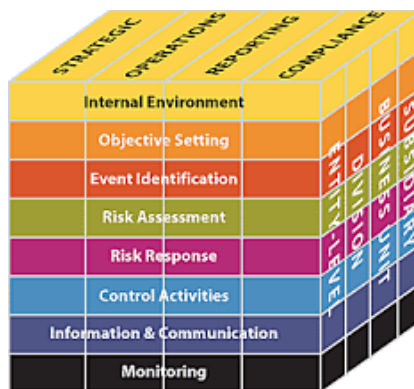
4. Informasi dan Komunikasi

Ketika melakukan perancangan terkait dengan sistem informasi, maka pihak manajemen tingkat atas dan perusahaan perlu mengetahui juga memahami beberapa hal seperti di bawah ini:

- Bagaimana memulai awal transaksi.
- Bagaimana pencatatan data ke dalam formulir yang selanjutnya siap untuk di masukkan pada sistem komputer.
- Bagaimana dilakukannya pembacaan data, pengorganisasian data, serta pembaharuan isinya. Bagaimana pemrosesan data agar dapat menjadi sebuah informasi, yang kemudian diproses kembali sehingga mampu menghasilkan dan menambah nilai guna informasi yang selanjutnya dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.
- Bagaimana pemberlakuan informasi sebagaimana mestinya.
- Bagaimana agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sukses

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi. Maka apabila terdapat suatu hal yang berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera dilakukan tindak lanjut.



Gambar 2.3 Komponen Kerangka Konseptual COSO

Sumber: *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013*

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

1. Pengertian GCG (*Good Corporate Governance*)

Dikutip dalam buku yang berjudul *Good Corporate Governance* (GCG) bahwa *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan

dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki (Sudarmanto *et al.*, 2021, p. 5).

2. Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Sunardi (2019) yang dikutip dari buku yang berjudul *Good Corporate Governance* (GCG), Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Sudarmanto *et al.*, 2021, p. 74) yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga kegiatan bisnis perusahaan berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan organisasi/ perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik. Prinsip ini diperlukan agar dapat
4. Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan dimana organisasi/ perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (*values*) yang ada pada organisasi perusahaan untuk dapat dijadikan *unique point* di antara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis tersebut.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing

3. Tujuan GCG (*Good Corporate Governance*)

Dikutip dalam buku yang berjudul *Good Corporate Governance* (GCG), menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ditujukan untuk (Sudarmanto *et al.*, 2021, p. 129) :

1. Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga menciptakan iklim yang mengandung investasi.
2. Mendorong pengelolaan persediaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan direksi dan dewan komisaris dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran dengan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan

4. Manfaat GCG (*Good Corporate Governance*)

Pada hakikatnya, prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Menurut Newel dan Wilson yang dikutip dalam buku *Good Corporate Governance* (GCG) secara teoritis, prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan pengurus dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor (Sudarmanto *et al.*, 2021, p. 29).

2.1.4 Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

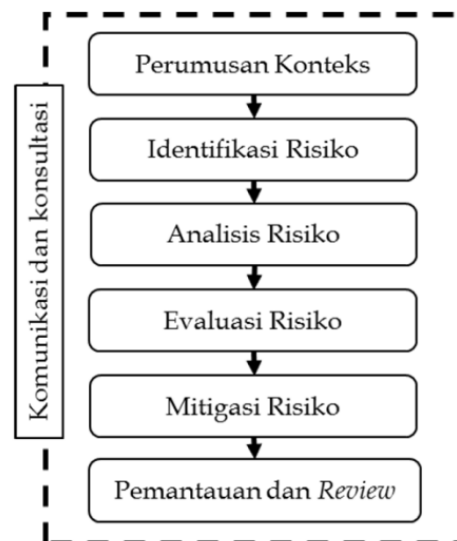
Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko (Arta *et al.*, 2021, p. 15)

Dikutip dari website www.kemenkeu.go.id menurut keputusan kementerian keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 menyebutkan bahwa manajemen risiko

adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi (Keputusan Menteri Keuangan RI, 2019).

2. Konsep Manajemen Risiko Menurut Kementerian Keuangan

Manajemen risiko di Kementerian Keuangan bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, peningkatan kinerja, dan meningkatkan sekaligus melindungi nilai tambah organisasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 mengenai manajemen risiko di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen risiko dapat diimplementasikan melalui pengembangan budaya kesadaran risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko dilaksanakan berurutan sesuai alur dari penyusunan sistem manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan penilaian sistem manajemen risiko. Proses manajemen risiko dijalankan secara berurutan sesuai gambar berikut:



Gambar 2.4 Proses Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan

Sumber : Kementerian Keuangan

3. Prinsip Manajemen Risiko

Dikutip dari website <https://djp.kemenkeu.go.id/> manajemen risiko berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 mempunyai beberapa prinsip (Keputusan Menteri Keuangan RI, 2019), yaitu:

1. Inklusif, yaitu melibatkan pengetahuan, pendapat, dan persepsi *stakeholder*.
2. Komprehensif dan sistematis, yaitu menerapkan suatu pendekatan sehingga menghasilkan manajemen risiko yang konsisten dan terukur.

3. Terintegrasi, yaitu menjadi satu kesatuan dari seluruh kegiatan organisasi.
4. Efektif dan efisien, yaitu memberikan perlindungan dan/atau meningkatkan nilai organisasi dengan sumber daya kompetitif, biaya minim, dan hasil kerja optimal.
5. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia, yaitu segala kerangka dan proses manajemen risiko didasarkan pada informasi masa lalu yang sudah terjadi, mempertimbangkan keterbatasan dan ketidakpastian data informasi yang dibutuhkan.
6. Dinamis, yaitu manajemen risiko harus mengantisipasi, mendeteksi, mengenali, dan menanggapi perubahan tersebut secara cepat dan tepat waktu.
7. Perbaikan terus menerus, yaitu terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman

4. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko berkaitan erat dengan bagian perusahaan lainnya (yaitu dengan bagian akunting, keuangan, marketing, produksi, personalia, *engineering*, dan *maintenance*) karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko. Berikut ini salah satu fungsi manajemen risiko di beberapa bagian (Arta *et al.*, 2021, p. 17):

A. Accounting :

1. Mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan uang perusahaan dengan jalan melakukan internal control dan internal audit.
2. Melalui rekening aset, bagian akunting mengidentifikasi dan mengukur exposure kerugian terhadap harta.
3. Melalui penilaian rekening seperti rekening piutang, bagian akunting mengukur risiko piutang dan mengalokasikan cadangan dana *exposure* kerugian piutang.

B. Finance :

1. Bagian akunting juga dapat menciptakan risiko, seperti risiko pemakaian komputer, risiko tanggung-gugat karena kemungkinan terjadi penyajian informasi yang salah.
2. Fungsi Manajemen Risiko dengan Bagian Keuangan Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang memengaruhi manajemen risiko.
3. Dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau gedung baru maka manajer finansial seharusnya mempertimbangkan risiko murni yang tercipta karena tindakan itu.

5. Tujuan Manajemen Risiko

Ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian (Arta *et al.*, 2021, p. 16):

1. Melindungi perusahaan (*protecting*), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
2. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
3. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.

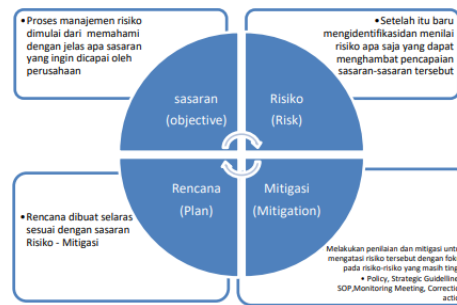
6. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, (Arta *et al.*, 2021, p. 24) yaitu :

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.

7. Siklus Manajemen Risiko Perusahaan (*Company Risk Management Cycle*)

Kelancaran penerapan manajemen risiko memerlukan dukungan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Manajemen Risiko Praktik manajemen risiko dapat digambarkan dalam sebuah siklus manajemen risiko perusahaan (*Company Risk Management Cycle*):



Gambar 2.5 Siklus Manajemen Risiko Perusahaan

Sumber : (Anita, S. Y., Kustina, K. T., Wiratikusuma, Y., Sudirjo, F., Sari, D., Rupiwardani, I., ... & Anwar, 2023)

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahapan manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan (Arta *et al.*, 2021, p. 21) :

1. **Identifikasi Risiko**, Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.
2. **Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko**, Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri- ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut.
3. **Menempatkan ukuran-ukuran risiko**, Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan.
4. **Menempatkan alternatif-alternatif**, pada tahap ini pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data.
5. **Menganalisis setiap alternatif**, pada tahap ini di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul.
6. **Memutuskan satu alternatif**, pada tahap ini setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajemen perusahaan maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam.

7. **Melaksanakan alternatif yang dipilih**, pada tahap ini setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan ini, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang dilengkapi dengan rincian biaya.
8. **Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut**, pada tahap ini alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan.
9. **Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih**, pada tahap ini setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan.

2.1.5 Piutang

1. Pengertian Piutang

Dikutip dari *website* resmi BPK RI <https://peraturan.bpk.go.id> mengenai kebijakan akuntansi berbasis akrual menyatakan bahwa Piutang adalah salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Bupati Pangkajene dan Kepulauan, 2014).

Menurut definisi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyimpulkan piutang adalah hak suatu entitas untuk menagih sejumlah dana kepada pelanggan yang disebabkan karena adanya transaksi jual beli, penggunaan jasa dsb yang menyebabkan adanya kesepakatan transaksi ekonomi sehingga ketika transaksi tersebut terjadi pihak penjual atau pemberi jasa dapat mengakui transaksi tersebut sebagai piutang.

2. Klasifikasi Piutang

Berdasarkan definisi diatas, terdapat tiga jenis klasifikasi piutang yang diutarakan oleh Hery (2021:62), diantaranya:

1. Piutang Usaha (*Accounts Receivable*),

Piutang yang akan ditagih kepada pelanggan karena hasil penjualan barang atau jasa layanan secara kredit. Piutang usaha memiliki jangka waktu relatif pendek, dengan kurun waktu 30-60 hari. Piutang usaha berada pada posisi normal debet dan diklasifikasikan sebagai aset lancar.

2. Piutang Wesel (*Notes Receivable*),

Piutang yang akan ditagih pada pembuat wesel atau pihak yang telah berhutang kepada perusahaan melalui penjualan secara kredit atau peminjaman uang beserta bunga sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Perjanjian piutang wesel ditulis secara formal dalam bentuk wesel atau promes (*promissory notes*).

3. Piutang Lain-lain (*Other Receivable*),

Piutang lain-lain adalah piutang diluar dari piutang usaha dan piutang wesel. seperti, piutang bunga, piutang dividen, piutang karyawan dan piutang pajak. Penggolongan piutang ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola piutang dengan lebih efektif dan efisien, terutama dalam mengidentifikasi risiko dan memperbaiki manajemen piutang yang kurang baik.

Sedangkan menurut Menurut Kieso D. (2018) menggolongkan piutang dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

1. Penggolongan piutang berdasarkan untuk tujuan dalam laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Piutang lancar (*short term receivables*) yang diharapkan akan tertagih atau diselesaikan dalam satu tahun atau selama siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang.
 - b. Piutang tidak lancar (*long term receivables*) adalah jenis piutang dimana yang masuk kategori ini merujuk pada seluruh piutang yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.
2. Penggolongan piutang berdasarkan sebab timbulnya piutang tersebut. Penggolongan piutang berkait dengan perbedaan penting antara piutang hasil penjualan dan bukan hasil penjualan.

Adapun tujuan dari adanya klasifikasi piutang bagi instansi yaitu untuk menyusun dan mengelola catatan pembayaran serta memastikan akurasi dalam mencatat transaksi keuangan dan upaya ini dapat membantu instansi menilai kondisi kesehatan keuangan dan kemungkinan perencanaan strategi keuangan yang lebih efektif. Klasifikasi piutang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam manajemen pengelolaan risiko terhadap kemungkinan piutang dana studi tak tertagih secara efektif dan efisien.

3. Analisa Umur Piutang

Menurut Putra (2022) mendefinisikan bahwa umur piutang adalah rincian saldo piutang yang dikelompokkan menurut golongan umur dan tabel yang menunjukkan kurun waktu piutang yang akan dilakukan pembayaran sesuai dengan saat dibuatnya

daftar umur piutang tersebut dan menurut Surjadi (2022) upaya dalam memastikan pembayaran piutang pelanggan salah satunya adalah dengan menganalisis umur piutang yang telah di klasifikasikan oleh perusahaan. Pengertian ini dikutip dalam jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang pada PT. Kawasan Industri Gresik (Mustofah & Cahyadi, 2022). Dengan melakukan analisis piutang menggunakan umur piutang maka akan dapat memberikan estimasi pemasukan yang akan diterima oleh perusahaan atas pembayaran piutang pelanggan untuk jangka waktu sekarang, masa depan ataupun perusahaan tidak akan mendapatkan hak atas pembayaran piutang tersebut. Untuk dapat menganalisis umur piutang tersebut maka perlu dikelompokkan berdasarkan nama vendor serta jangka waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar umur piutang

Menurut Yuliyanto (2020), umur Piutang atau dapat disebut sebagai *Aging* menunjukkan utang-utang yang belum dibayarkan oleh debitur. Umumnya umur piutang di buat oleh account *receivable* untuk menentukan lamanya dari utang yang belum terbayarkan. Dalam penagihan piutang, terdapat periode yang ditentukan atau disebut *aging of account receivable*. *Aging* merupakan umur dalam melakukan penagihan utang kepada setiap *customer* agar kedepannya setiap *customer* tidak memiliki masa waktu penagihan yang panjang atau lama. *Aging* dapat dikategorikan baik apabila aging tersebut kurang dari 30 hari atau 60 hari, aging yang buruk dapat dikategorikan sebagai aging yang memiliki waktu lebih dari 90 hari atau 120 hari.

Aging schedule dapat pula disebut sebagai aktivitas dalam menganalisis umur piutang, dimana skala pengukurannya berupa tanggal jatuh tempo. Batas jatuh tempo ini berbeda-beda tergantung berapa lama perusahaan memberikannya kepada debitur. *Aging* dapat dikategorikan baik apabila *aging* tersebut kurang dari 30 hari atau 60 hari, sementara aging yang buruk dapat dikategorikan sebagai aging yang memiliki waktu lebih dari 90 hari atau 120 hari.

4. Pengendalian Internal Piutang

Pengendalian internal piutang adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa entitas memiliki proses yang efektif dalam mengelola dan mengontrol piutangnya. Pengendalian ini meliputi langkah-langkah seperti pembuatan surat perjanjian pembayaran, pemantauan pembayaran pelanggan, evaluasi kredit pelanggan, penagihan tepat waktu, pemisahan tugas, rekonsiliasi berkala, dan penerapan kebijakan pembayaran yang ketat untuk mengurangi risiko kerugian piutang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa entitas dapat

mengoptimalkan penerimaan piutangnya dengan risiko minimal terkait keterlambatan pembayaran atau kerugian piutang.

1. Konfirmasi Piutang

Konfirmasi eksternal adalah hasil audit yang diperoleh sebagai suatu respon dari pihak lain tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga (pihak yang dikonfirmasi), baik dalam bentuk kertas, atau secara elektronik atau media lainnya. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang sesuai dan dapat diandalkan. disesuaikan pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas (IAPI, 2016).

Dikutip dari *website* Institut Akuntan Publik Indonesia <http://spap.iapi.or.id/>

Menurut SA 505 (SPAP:2016) terdapat bentuk konfirmasi (IAPI, 2016) yaitu :

1. Konfirmasi Positif, adalah permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi.
2. Konfirmasi Negatif, adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi.

2. Pengendalian atas Permintaan Konfirmasi

Pengendalian atas permintaan konfirmasi piutang adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa permintaan konfirmasi piutang dilakukan secara efisien, akurat, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Ini melibatkan langkah-langkah seperti verifikasi keabsahan permintaan konfirmasi, pengawasan terhadap proses pengiriman dan penerimaan konfirmasi, pemisahan tugas yang tepat, serta pemantauan dan pelaporan hasilnya. Adapun tujuan dilakukannya pengendalian atas permintaan konfirmasi piutang yaitu (Aimbu *et al.*, 2021) :

1. Memastikan bahwa nama, jumlah, dan alamat pada konfirmasi telah sesuai dengan data terkait dalam akun pelanggan.
2. Menjaga penyimpanan konfirmasi sampai dikirimkan.
3. Menggunakan amplop yang dilampirkan dengan logo perusahaan bersangkutan untuk menjaga konfirmasi.

4. Menangani sendiri memasukkan surat konfirmasi ke dalam amplop dan mengirimkan melalui pos.
5. Mewajibkan pengiriman jawaban langsung kepada auditor.

2.1.6 Pengertian Piutang Tak Tertagih

Menurut Kieso, *et all* 2021 yang dikutip dalam jurnal ilmiah Piutang tak tertagih adalah piutang yang sulit atau bahkan tidak mungkin ditagih oleh perusahaan dan dilunasi oleh debitur karena tidak sanggup atau enggan untuk membayar piutang tersebut (Pryhanni, 2023). Pada dasarnya piutang yang telah ditetapkan menjadi piutang tak tertagih bukan lagi menjadi aktiva. Piutang tak tertagih menjadi kerugian bagi perusahaan karena tidak dapat direalisasikan dan harus dicatat sebagai kerugian dalam laporan laba rugi dan dikeluarkan dari pos aktiva pada laporan posisi keuangan dan dicatat di posisi beban sebagai kerugian. Sehingga dapat dikatakan bahwa piutang tak tertagih adalah kerugian materiil yang dialami perusahaan karena beberapa konsumen tak bisa membayar kewajibannya yang disebabkan karena tidak diketahui keberadaan pelanggan tersebut, tak berkeinginan membayar piutangnya, tidak bisa membayar, serta kondisi lain yang menyebabkan pelanggan tidak membayar piutangnya. Kerugian pendapatan diakui dengan mencatat beban rugi tak tertagih. Beban kerugian tak tertagih adalah biaya untuk perusahaan yang membagikan kredit.

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Piutang Tak Tertagih

Berdasarkan pengertian Piutang Tak Tertagih yang sudah dijelaskan diatas, berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet atau piutang tak tertagih menurut Rivai, dkk (2018:238-239) yang dikutip dalam jurnal ilmiah mengenai manajemen piutang dalam meminimalisir risiko piutang tak tertagih (Zebua *et al.*, 2022) yaitu :

1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari pihak kreditur. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu: Keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah di tegaskan dan terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kekayaan.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang yang berasal dari pihak debitur, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang telah disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi, adanya salah satu arus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang pengalaman dalam bidang usaha yang ditangani.

2. Risiko Piutang Tak Tertagih

Dikutip dalam jurnal riset akuntansi mengenai analisis pengendalian piutang untuk meminimalkan resiko piutang tak tertagih, mengatakan bahwa suatu resiko yang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit disebut sebagai resiko kerugian piutang (Aimbu *et al.*, 2021). Resiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam yaitu:

1. Risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan (piutang)
2. Risiko tidak dibayarnya sebagian piutang
3. Risiko keterlambatan pelunasan piutang
4. Risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang.

3. Penghapusan Piutang

Penjualan dengan pembayaran secara kredit dapat menyebabkan terjadinya keuntungan sekaligus kerugian. Penerimaan dan keuntungan perusahaan akan meningkat, tetapi kerugian yang dialami perusahaan meningkat dan tetap ada karena meningkatnya jumlah piutang tak tertagih. Untuk perusahaan yang melakukan penjualan kredit, perlu mengetahui jumlah beban piutang tak tertagih. Dikutip dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/> umumnya ada dua cara mencatat beban piutang tak tertagih yaitu:

a. Metode Penyisihan (*allowance*)

Dalam pencatatan kerugian, tidak menunggu sampai konsumen benar-benar tidak mampu membayar, melainkan memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak akan dibayar oleh konsumen. Untuk menaksir jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, manajemen dapat menggunakan dua dasar yaitu:

1. Metode Persentase Penjualan (Pendekatan Laba Rugi) Metode yang paling sering digunakan untuk memperkirakan beban jumlah piutang tak tertagih, dengan menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan perusahaan. Sedapat mungkin angka penjualan dipakai adalah penjualan kredit. Namun, apabila untuk memperoleh angka tersebut diperlukan terlalu banyak waktu dan biaya maka persentase dapat juga berdasarkan total penjualan. Persentase tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman perusahaan.
2. Metode Umur Piutang (Pendekatan Neraca) Piutang usaha dianalisis secara individu berdasarkan lamanya waktu piutang tersebut berada dalam perkiraan perusahaan. Jadi titik tolak penentuan umur piutang adalah tanggal jatuh tempo piutang tersebut. Analisis diselesaikan dengan menjumlahkan masing-masing lajur

untuk mendapatkan angka total dari setiap kelompok umur. Untuk mendapatkan angka estimasi piutang tak tertagih dari masing-masing kelompok, total dikalikan dengan persentase tertentu, yang didasarkan atas pengalaman.

b. Metode Penghapusan Langsung (*direct write-off*)

Metode ini baru mengakui beban penghapusan piutang tak tertagih apabila bagian kredit menyatakan bahwa piutang tersebut tak tertagih. Dalam penerapan metode ini jumlah kerugian tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan tidak digunakan rekening cadangan kerugian piutang. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian akibat piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan rekening piutang usaha kredit. Bila ditinjau dari metode ini tidak memberikan gambaran yang baik dalam laporan laba rugi maupun neraca perusahaan, karena rekening kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah kerugian yang diderita, dan piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sebesar jumlah brutonya dan pelaporan biaya (kerugian) tidak pada periode yang sama dengan periode penjualannya. Alasan tersebut diatas mendasari bahwa metode penghapusan langsung tidak diakui dalam pelaporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat enam penelitian terkait yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini, diantaranya : karya ilmiah skripsi yang dilakukan oleh Hervenny (2022) mengenai analisis sistem pengendalian internal terhadap penjualan di PT. Kars Inti Utama, adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern Penjualan yang telah diterapkan dan menilai bagaimana efektivitasnya setelah dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam penjualan di PT. Kars Inti Utama telah berjalan cukup baik, sesuai dengan teori pengendalian internal yang *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*. Perusahaan ini memiliki pengendalian yang memadai dalam aspek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, serta pemantauan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2020) mengenai analisis penerapan manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. kualitatif

.Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kehati-hatian petugas akun (pemasaran) dalam menganalisis 5C, kesalahan dalam analisis sebelum penyaluran pembiayaan, kurangnya pemantauan terhadap nasabah pembiayaan, dan ketidaklaksanaan kunjungan harian terhadap nasabah pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal melibatkan nasabah yang memiliki lebih dari satu usaha tanpa penilaian kelayakan yang tepat, perubahan lokasi usaha, ketidakpastian ekonomi, kondisi kesehatan nasabah, perilaku buruk nasabah, kehilangan kemampuan pembayaran, dan kematian nasabah pembiayaan. Upaya penerapan manajemen risiko dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pryhanni (2023) terkait analisis sistem pengendalian piutang dalam meminimalisir piutang tak tertagih di PT. Kaya Raya Turun Menurun, ditemukan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal piutang dengan baik. Evaluasi efektivitasnya menunjukkan bahwa sistem ini telah berjalan cukup efektif, walaupun terdapat celah pengendalian yang berhasil diidentifikasi terkait perilaku karyawan yang kurang jujur atau tidak amanah dalam menjaga dan mengendalikan aset perusahaan, terutama piutang.

Penelitian mengenai manajemen piutang di teliti juga oleh Putri (2023) dengan hasil yaitu pertama, kebijakan kredit di PT Aerofood ACS Unit Denpasar kurang efektif karena hanya mempertimbangkan karakter dan kapasitas dalam pemberian kredit, tanpa memenuhi analisis 5C secara menyeluruh. Selanjutnya, kinerja manajemen piutang di PT Aerofood ACS Unit Denpasar sesuai dengan kebijakan *invoicing* dan penagihan, namun belum optimal, sehingga piutang belum dapat ditagih sepenuhnya

Wahyudi (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengendalian Internal Piutang Mahasiswa dalam Meminimalisir Risiko Piutang Tak Tertagih di Universitas Airlangga," dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder serta pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal terhadap piutang di Universitas Airlangga kurang efektif, yang ditandai dengan rendahnya perputaran piutang dan besarnya jumlah piutang. Prinsip pengendalian internal menurut COSO, terutama dalam lingkungan pengendalian eksternal dan filosofi serta gaya operasi manajemen, tidak diterapkan dengan baik sesuai temuan penelitian tersebut.

Dalam studi yang dilakukan oleh Wicaksono dan rekan-rekannya (2022) tentang pengendalian piutang di Hotel Z di Jakarta Pusat selama masa pandemi Covid-19, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data piutang dianalisis dengan menggunakan umur piutang untuk mengestimasi jumlah piutang tak tertagih. Kesimpulan akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah piutang tak tertagih pada PT Kawasan Industri Gresik mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Pendekatan ini dilakukan dengan mencadangkan sebesar 5% dari setiap pos umur piutang untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	(Hervenny, 2022)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penjualan di PT. Kars Inti Utama	Sistem Pengendalian Internal dan Penjualan.	Penelitian Kualitatif menggunakan Pendekatan Deskriptif	Pengendalian intem dalam penjualan di PT Kars Inti Utama sudah cukup baik yang diterapkan sesuai dengan teori pengendalian intem menurut COSO. PT Kars Inti Utama memiliki pengendalian yang memadai pada system penjualan dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian serta pemantauan yang diterapkan oleh Perusahaan
2.	(Nadia, 2020)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.	Managemen Risiko dan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.	Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	1. faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. - Faktor internal yaitu kurang cermatnya <i>Account officer (marketing)</i> dalam menganalisis 5C, salah dalam analisa sebelum pengambilan pembiayaan, kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dan tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan.

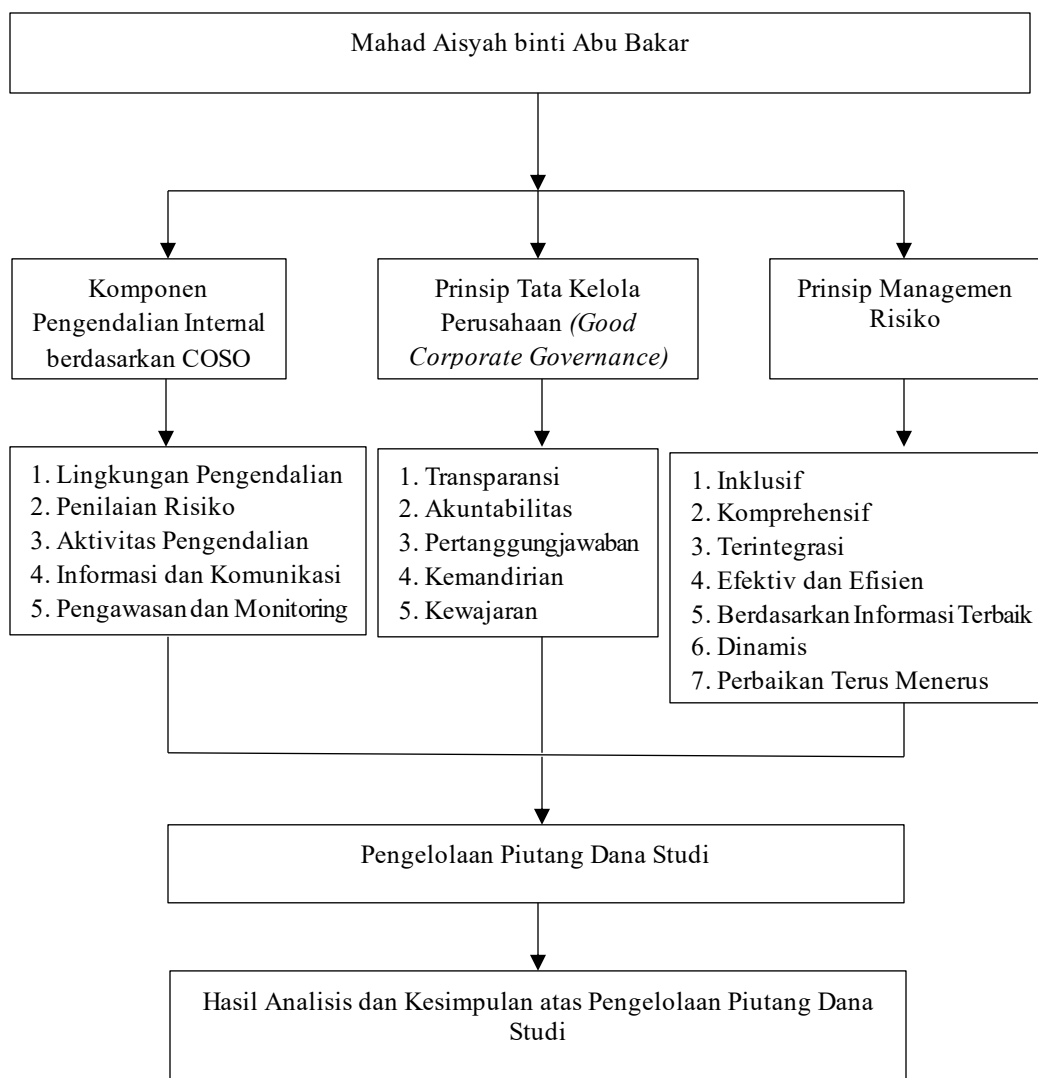
NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
					- Faktor eksternal yaitu nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur, berpindah tempat usaha, keadaan ekonomi yang tidak menentu, nasabah dalam keadaan sakit, karakter nasabah yang buruk, kemampuan bayar nasabah yang tidak ada lagi dan nasabah pembiayaan yang sudah meninggal. 2. Penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga 85 pembiayaan selesai. Adapun langkah-langkahnya yaitu identifikasi risiko dengan cara melakukan analisis 5C dan memeriksa kelengkapan dokumen, pengukuran risiko dengan cara mengkategorikan pembiayaan, pemantauan risiko dengan cara rutin mengunjungi nasabah untuk pemantauan secara langsung dan langkah terakhir yaitu pengendalian risiko dengan cara <i>persuasive</i> atau musyawarah, penjadwalan kembali (<i>reschedulling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), penataan kembali (<i>restrucuting</i>) serta penarikan jaminan.

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
3	(Pryhanni, 2023)	Analisis Sistem Pengendalian Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih di PT. Kaya Raya Turun Menurun.	Sistem Pengendalian Piutang dan Piutang Tak Tertagih.	Penelitian Kualitatif Menggunakan Pendekatan Deskriptif	1. Penerapan sistem pengendalian internal piutang pada PT. Kaya Raya Turun Temurun telah terprogram dan terlaksana dengan baik. 2. Efektivitas penerapan sistem pengendalian internal piutang pada PT. Kaya Raya Turun Temurun sudah berjalan cukup efektif berdasarkan perbandingan antara manfaat dan celah pengendalian. Celah pengendalian yang berhasil diidentifikasi yakni perilaku pada karyawan yang masih tidak jujur atau tidak amanah dalam menjaga dan melindungi aset perusahaan yaitu piutang.
4.	(Putri, 2023)	Analisis Manajemen Piutang dalam Meminimalisir Risiko Piutang Tak Tertagih di PT. Aerofood ACS Unit Denpasar.	Manajemen Piutang dan Risiko Piutang Tak Tertagih.	Penelitian Kualitatif menggunakan Pendekatan Deskriptif	1. Kebijakan kredit pada PT. Aerofood ACS Unit Denpasar belum efektif. Karena analisis 5C tidak terpenuhi untuk standar pemberian kredit, perusahaan hanya menerapkan faktor character dan capacity dalam pemberian fasilitas kreditnya, sementara faktor capital, condition dan collateral tidak diterapkan oleh Perusahaan 2. Kinerja manajemen piutang pada PT Aerofood ACS Unit Denpasar yakni pada standar invoicing dan penagihan piutang sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan namun belum berjalan optimal dan piutang belum dapat ditagih secara maksimal.
5.	(Wahyudi, 2020)	Analisis Pengendalian	Pengendalian Internal Piutang	Analisis Deskriptif, Data	Pengendalian internal piutang pada Universitas

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		an Internal Piutang Mahasiswa dalam Meminimalisir Risiko Piutang Tak Tertagih di Universitas Airlangga	Mahasiswa dan Risiko Piutang Tak Tertagih.	didapatlkan dari data primer dan sekunder dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Airlangga kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya perputaran piutang dan besarnya jumlah piutang. Prinsip pengendalian internal menurut COSO pada lingkungan pengendalian secara eksternal dan filosofi dan gaya operasi manajemen tidak diterapkan dengang baik.
6.	(Wicaksono <i>et al.</i> , 2022)	Analisis Pengendalian Piutang Hotel Z Di Jakarta Pusat Pada Masa Pandemi Covid-19	Pengendalian Piutang dan Masa Pandemi Covid-19.	Penelitian ini Menggunakan Metode Kuantitatif dan Analisis Kuantitatif, hasil akhir berupa generalisasi.	Hasil dari penelitian ini yaitu Perusahaan melakukan pengendalian piutang yang terbaik dalam menagih hutang dengan persentase di atas 60%. Dalam melakukan pengendalian piutang, Hotel Z sudah melakukan yang terbaik dalam menagih piutang. Hal ini dapat di buktikan dari average collection period (ACP) yang kurang dari 30 hari, account receivable turn-over yang tinggi serta rasio penagihan piutang yang 83%. Kemudian <i>Account receivable turn-over</i> yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, dimana ARTO tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 33,57 kali, maksudnya adalah dalam setahun terdapat 34 kali piutang yang dibayarkan. Sementara ARTO terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 17,27 kali, hal ini disebabkan penjualan kredit yang minim karena pandemic Covid-19.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019:95) dikutip dalam jurnal ilmiah menjelaskan bahwa kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Maka secara teoritis harus dijelaskan antar variabel independen dengan dependen (Wahyuni, 2021). Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan mengembangkan penelitian dengan menyediakan struktur yang jelas untuk memahami hubungan antar variabel yang digunakan serta memberikan landasan pemahaman yang kokoh terhadap penelitian. dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko terhadap Pengelolaan Piutang di Mahad Aisyah binti Abu Bakar.



Gambar 2.6 Kerangka Konseptual

Sumber : Hasil Olah Data (2024)